

TRANSFORMASI PENDIDIKAN AGAMA SEBAGAI UPAYA PEMBUDAYAAN DAN PEMBERDAYAAN KARAKTER ANAK DIDIK

Oleh:

I NYOMAN TEMON ASTAWA

Abstract

Education is a process of acculturation and human empowerment that is developing into an independent personality to be able to establish themselves and society. Civilizing process and empowering last a lifetime, which in the process there should be educators who provide exemplary and able to build a whim, and to develop the potential and creativity of learners. That principle led to a paradigm shift process of education, from teaching paradigm to a learning paradigm. The paradigm of teaching is more focused role of educators in transforming knowledge to the learners to shift the paradigm of learning which enables more learners to develop the potential and creativity of himself in order to form a human who has the spiritual power of religion, morality, personality, intelligence, aesthetics, physically and mentally healthy, as well as the skills required for destiny, society, nation and state.

Abstrak

Pendidikan adalah proses pembudayaan dan pemberdayaan manusia yang sedang berkembang menuju kepribadian mandiri untuk dapat membangun diri sendiri dan masyarakat. Proses pembudayaan dan pemberdayaan berlangsung sepanjang hayat, dimana dalam proses tersebut harus ada pendidik yang memberikan keteladanan dan mampu membangun kemauan, serta mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. Prinsip tersebut menyebabkan adanya pergeseran paradigma proses pendidikan, dari paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran. Paradigma pengajaran lebih menitikberatkan peran pendidik dalam mentransformasikan pengetahuan kepada peserta didiknya bergeser pada paradigma pembelajaran yang memberikan peran lebih banyak kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kreativitas dirinya dalam rangka membentuk manusia yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, berakhlak mulia, berkepribadian, memiliki kecerdasan, memiliki estetika, sehat jasmani dan rohani, serta keterampilan yang dibutuhkan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

I. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah pemberdayaan bagi manusia didik dalam menghadapi dinamika kehidupan baik masa kini maupun masa yang akan datang, maka pemahaman tentang kemanusiaan secara utuh merupakan keniscayaan. Sebaliknya, jika pengertian dan pemahaman terhadap pendidikan kurang tepat tentu akan melahirkan konsep dan praktik pendidikan yang juga kurang proporsional. Memahami manusia bukan pekerjaan yang mudah. Perbincangan tentang manusia itu sendiri juga dinamis, berkembang dari waktu ke waktu sesuai perkembangan peradaban yang tak pernah usai. Karena pemahaman manusia yang terus berkembang maka pendidikan itu sendiri harus dinamis.

Proses pendidikan harus mampu menyentuh dan mengendalikan berbagai aspek perkembangan manusia. Terkandung makna di sini bahwa melalui proses pendidikan diharapkan manusia berkembang kearah bagaimana dia harus menjadi dan berada. Jika pendidikan ini dipandang sebagai suatu upaya untuk menjadi manusia menjadi apa yang bisa diperbuat dan bagaimana dia harus menjadi dan berada, maka pendidikan harus bertolak dari pemahaman tentang hakikat manusia. Pendidik perlu memahami manusia dalam hal aktualisasinya, kemungkinannya, dan pemikirannya, bahkan memahami perubahan yang dapat diharapkan terjadi dalam diri manusia.

Pendidikan bila ditinjau dari konteks kebudayaan, maka pendidikan dimaknai sebagai proses pembudayaan peserta didik. Budaya itu sendiri merupakan buah keadaban manusia. Selanjutnya melalui proses pendidikan, peserta didik dituntun menjadi manusia yang makin beradab dan berakhlak. Adalah keliru apabila peserta didik yang diberi pendidikan justru menjadi manusia yang tidak beradab dan tidak berakhlak. Maka, melalui pendidikan agama dan budaya yang ada kiranya menjadikan peserta didik berilmu serta beradab dan berakhlak.

II. PEMBAHASAN

2.1 Pendidikan Agama Sebagai Sub Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan merupakan suatu usaha terencana yang dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok tentu saja dalam proses pelaksanaannya diperlukan adanya landasan yang menjiwai usaha-usaha pendidikan itu sendiri, yang bentuk dan sifatnya sangat tergantung pada nilai-nilai dan falsafah yang dianut oleh masyarakat suatu bangsa yang bersangkutan. Demikian halnya di Indonesia dalam berbangsa dan bernegara telah ditetapkan tiga hal pokok yang mendasari setiap usaha dan kegiatan, termasuk kegiatan pendidikan yaitu Pancasila sebagai landasan ideal, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional dan GBHN sebagai landasan operasional yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai luhur dan kehendak yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, Pendidikan Agama merupakan sub bagian dari sistem Pendidikan Nasional sumber dan materi Pendidikan Agama itu sendiri, juga pada norma yang melandasi dan menjiwai Pendidikan Nasional tersebut.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia nampak secara jelas urgensi dan kedudukan Pendidikan Agama diantara jenis pendidikan yang lain. Hal ini tergambar dalam uraian sebagai berikut :

UUD 1945, pasal 29 :Ayat 1 yang berbunyi :“Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”

Ayat 2 berbunyi :

“Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut menurut agama dan kepercayaannya itu.”

Pada pasal UUD 1945 di atas tersurat secara gamblang akan jaminan kepada setiap warga negara RI untuk memeluk agama dan

beribadat sesuai dengan agama yang dianutnya serta kegiatan yang dapat menunjang bagi pelaksanaan ibadah. Dengan demikian Pendidikan Agama yang searah bahkan menunjang pelaksanaan ibadah yang diyakininya, diizinkan dan dijamin oleh negara. Di dalam GBHN tahun 1992-2000 pada bagian agama nomor 2 dinyatakan, sebagai berikut :“Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan melalui penyempurnaan sistem pendidikan agama sehingga lebih terpadu dan integral dengan sistem pendidikan nasional dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai”.

Hal di atas menggambarkan dengan jelas tentang kedudukan dan perhatian pemerintah terhadap pendidikan agama. Bila dibandingkan dengan GBHN sebelumnya, maka dalam GBHN ini memberikan penekanan lebih jelas dan tegas terhadap eksistensi dan pembinaan pendidikan agama. Undang-Undang Sisdiknas no. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional Dalam pasal 55 ayat 1 tentang pendidikan nasional disebutkan bahwa :“Diatur mengenai hak masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan pendidikan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial dan budaya untuk kepentingan masyarakat”.

Selanjutnya dalam pasal 30 ayat 1 disebutkan :“Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dari uraian itu dapat dipahami bahwa Pendidikan Agama memiliki kekuatan dan kedudukan yang sangat strategis dalam kerangka sistem yuridis formal di negara Republik Indonesia. Selain itu, tergambar betapa pentingnya Pendidikan Agama sebagai suatu bagian dari usaha pembimbingan dan pemberdayaan sumber daya insani harus memiliki tujuan yang jelas, terutama usaha pendidikan agama yang diselenggarakan oleh institusi-institusi pendidikan formal.

Tujuan Pendidikan Agama adalah merupakan penjabaran dari bunyi Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional tentang sistem pendidikan nasional, Bab II pasal 4 yaitu: “Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.

Dengan tercantumnya kata-kata beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam rumusan tujuan pendidikan nasional tersebut menunjukkan bahwa pendidikan agama berperan langsung dalam usaha pencapaian tujuan pendidikan nasional karena keimanan dan ketaqwaan hanya dapat dicapai secara sempurna melalui pendidikan agama. Karena itu pendidikan agama, mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam mencapai tujuan dan keberhasilan pendidikan nasional.

Jadi Pendidikan Agama bertujuan untuk meningkatkan kualitas keberagamaan serta kemampuan beradaptasi dengan masyarakat bangsa dan bernegara. Di bawah tujuan kurikulum

terdapat pula tujuan intruksional yang merupakan tujuan yang pencapaiannya dibebankan pada satuan unit program pengajaran suatu bidang studi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan Pendidikan Agama pada dasarnya tidak terlepas dari tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan

2.2 Pendidikan Agama dan Wajar Diknas

Program Wajib Belajar pada hakikatnya merupakan upaya sistematis pemerintah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam keseluruhan pembangunan nasional serta adaptif dalam penyerapan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), yang muaranya adalah mendekatkan pada pencapaian tujuan pembangunan nasional, yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, Program Wajib Belajar juga merupakan salah satu pengembangan skenario pendidikan yang dijangkaukan untuk perluasan dan pemerataan kesempatan belajar bagi setiap warga negara. Kebijakan tersebut merupakan salah satu pengejawantahan isi pasal 31 UUD 1945 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Dalam kaitannya dengan pendidikan untuk semua tersebut, deklarasi pendidikan untuk semua di Indonesia, khususnya berkaitan dengan pengembangan pendidikan dasar, adalah pendidikan semesta (*Universal Education*). Artinya, sistem pendidikan nasional di Indonesia dikerangkakan untuk membuka dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua warga negara untuk memperoleh pendidikan dasar.

Program Wajib Belajar di Indonesia dimaknai sebagai pemberian kesempatan belajar seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan sampai dengan tingkat pendidikan tertentu. Ditinjau dari dimensi pembangunan nasional secara keseluruhan, Program Wajib Belajar merupakan salah satu bentuk kebijakan nasional dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Meskipun secara makro, peningkatan sumber daya manusia tersebut juga mencakup aspek sosial dan ekonomi, namun dimensi utama dan kuncinya adalah pendidikan.

Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia Indonesia tersebut, sistem pendidikan nasional harus dapat memberikan pendidikan dasar bagi setiap warga negara agar masing-masing memperoleh sekurang-kurangnya pengetahuan dan kemampuan dasar yang diperlukan untuk dapat berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, Program Wajib Belajar mendesak untuk dilaksanakan sehubungan dengan tuntutan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu aset dan potensi utama pembangunan nasional. Menyadari betapa besar dan penting peran pendidikan dalam peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan penancangan dan pemberlakuan Program Wajib Belajar bagi setiap warga negara. Pada tahap awal Pemerintah telah mencanangkan Program Wajib Belajar 6 Tahun yang pada dasarnya

merupakan prasyarat umum bahwa setiap anak usia sekolah dasar (7-12 tahun) harus dapat membaca, menulis, dan berhitung.

Program Wajib Belajar 6 Tahun yang dicanangkan Pemerintah pada PELITA III tersebut telah memberikan dampak positif dan hasil yang mengembirakan, terutama pada percepatan pemenuhan kualitas dasar manusia Indonesia. Salah satu hasil yang paling mencolok dirasakan, bahwa Program Wajib Belajar 6 Tahun tersebut telah mampu menghantarkan Angka Partisipasi (Murni) Sekolah. Dalam rangka memperluas kesempatan pendidikan bagi seluruh warga negara dan juga dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, Pemerintah melalui PP No. 28/1990 tentang Pendidikan Dasar menetapkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Orientasi dan prioritas kebijakan tersebut, antara lain: (1) penuntasan anak usia 7-12 tahun untuk Sekolah Dasar (SD), (2) penuntasan anak usia 13-15 tahun untuk SLTP, dan (3) pendidikan untuk semua (educational for all).

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun diharapkan mampu mengantarkan manusia Indonesia pada pemilikan kompetensi Pendidikan Dasar, sebagai kompetensi minimal. Kompetensi Pendidikan Dasar yang dimaksudkan, mengacu pada kompetensi yang termuat dalam Pasal 13 UU No. 2/1989 yaitu kemampuan atau pengetahuan dan ketrampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi (pendidikan menengah). Hal ini juga relevan dengan unsur-unsur kompetensi pendidikan dasar yang harus dikuasai lulusan seperti yang diidentifikasi oleh The International Development Research Center, meliputi:

- (1) kemampuan berkomunikasi
- (2) kemampuan dasar berhitung
- (3) pengetahuan dasar tentang negara, budaya, dan sejarah
- (4) pengetahuan dan ketrampilan dasar dalam bidang kesehatan, gizi, mengurus rumah tangga, dan memperbaiki kondisi kerja
- (5) kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat, memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, bersikap dan berpikir kritis, serta dapat memanfaatkan perpustakaan, buku-buku bacaan, dan siaran radio.

Program wajib belajar 9 tahun yang didasari konsep “pendidikan dasar untuk semua” (universal basic education), juga sejalan dengan Piagam PBB tentang Hak Asasi Manusia, tentang Hak Anak, dan tentang Hak dan Kewajiban Pendidikan Anak. Di samping itu, menurut May, wajib belajar 9 tahun juga bertujuan merangsang aspirasi pendidikan orangtua dan anak yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja penduduk secara nasional. Untuk itu, target penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun bukan semata-mata untuk mencapai target angka partisipasi sesuai dengan target yang ditentukan namun perhatian yang sama ditujukan juga untuk memperbaiki kualitas pendidikan dasar dan pelaksanaan pendidikan yang mangkus (efektif). Pelaksanaan dan ketuntasan program wajib belajar juga mampu mengurangi angka

kemiskinan. Melalui pendidik ini pula, bangsa Indonesia mampu mencapai cita-citanya, yaitu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. “Pendidikan adalah kekuatan”, maka Bangsa Indonesia akan segera terbebas dari kebodohan dan kemiskinan serta menjadi bangsa yang unggul pada kompetisi global. Lebih lanjut, wajib belajar merupakan fondasi bagi pengembangan jenjang pendidikan lebih lanjut dan kemajuan peradaban bangsa khususnya dalam menghadapi tantangan dan perkembangan zaman dan kompetisi tingkat global. Pendidikan dasar juga mampu mewujudkan masyarakat yang cerdas, dan ekonomi yang mapan sehingga negara menjadi maju.

Di sisi lain, pelaksanaan wajar baik 6 tahun maupun 9 tahun secara umum bertujuan untuk: 1) memberikan kesempatan setiap warga negara tingkat minimal SD dan SMP atau yang sederajat, 2) setiap warga negara dapat mengembangkan dirinya lebih lanjut yang akhirnya mampu memilih dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki, 3) Setiap warga negara mampu berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, dan 4) Memberikan jalan kepada siswa untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya, berkaitan dengan hal di atas Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara, merupakan pegangan hukum yang kuat dalam menerapkan wajib belajar, seperti dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan persentase peserta didik sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/pendidikan yang sederajat terhadap penduduk usia 7-12 tahun atau angka partisipasi murni (APM) sekurang-kurangnya menjadi 95 % pada akhir tahun 2008;
- 2) Meningkatkan persentase peserta didik sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/pendidikan yang sederajat terhadap penduduk usia 13-15 tahun atau angka partisipasi kasar (APK) sekurang-kurangnya menjadi 95 % pada akhir tahun 2008.

2.3 Pembentukan Karakter Bangsa

Era globalisasi ini telah mendorong banyak perubahan di negara-negara dunia termasuk dalam ranah pendidikan negara tersebut. Pendidikan memegang peranan penting bagi semua aktor (negara, masyarakat sipil, kelompok bisnis) dan memegang peranan penting pada segala jaman. Persoalannya adalah, pendidikan saat ini didesain untuk kepentingan siapa? Apakah aktor-aktor pendidikan yang memiliki kepentingan dan logika sendiri-sendiri saling mengunci/non-kolaboratif atau bersifat kolaboratif? Inilah salah satu pertanyaan dan tantangan besar bagi pendidikan di Indonesia.

Ranah pendidikan selama ini banyak berfokus pada kapabilitas negara untuk menyelenggarakan pendidikan. Padahal disisi lain, kapabilitas negara tidak begitu kuat dalam menyelenggarakan pendidikan. Kita dapat melihat bagaimana masih

banyaknya sekolah rusak (infrastruktur), masih banyaknya anak muda yang tidak sekolah hingga kapasitas guru yang tidak memadai. Disisi lain, dunia bisnis semakin kuat menjadikan anak muda sebagai bagian dari kelas konsumsi mereka, apabila anak muda cukup cerdas maka dia akan ditarik untuk memperkuat bangun kepentingan bisnis. Organisasi masyarakat sipil tidak tinggal diam dengan tetap menyelenggarakan pendidikan melalui dunia pesantren, seminari, pasraman hingga pendidikan alternatif. Namun sayangnya organisasi masyarakat sipil ini sedikit mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam menyelamatkan generasi muda.

Generasi muda secara tidak sadar terhimpit oleh banyak kepentingan didalam dunia pendidikan. Sayangnya mereka hanya menjadi obyek desain pendidikan yang ada sekarang ini. Dominasi kepentingan bisnis didalam pengelolaan pendidikan telah masuk pada ranah negara dan masyarakat sipil melalui standarisasi yang menjadi nafas globalisme. Akibatnya karakter manusia Indonesia yang terbentuk adalah market minded. Karakter yang terbentuk ini tidak sesuai dengan agenda bangsa/nasional karena tidak ada keterikatan dengan masyarakat dan cenderung *profit oriented*. Kita harus mengembalikan pendidikan kedalam kerangka nasional/negara. Hubungan yang harus dibangun adalah hubungan antara negara dan warga negara. Logika dan kekuasaan kepentingan bisnis saat ini sangat berbahaya disebabkan oleh karakter dari kekuatan modal yang tidak mengenal batas teritorial negara. Akibatnya kepentingan bisnis tidak memiliki tanggung jawab moral apapun terhadap negara dan masyarakat. Sifat modal yang berpindah-pindah harus kita waspadai dan sudah saatnya kita kembali mengatakan dan berikhtiar bahwa pendidikan bukan sektor yang diperjual belikan dan menjadi salah satu amanah berdirinya Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam *preamble*.

Konsep Ki Hadjar Dewantara mengenai Tri Pusat pendidikan sangat bagus namun ada tantangan serius terhadap konsep Ki Hadjar Dewantara tersebut, yakni perkembangan teknologi dan arus informasi yang cukup pesat. Perkembangan teknologi informasi ini telah masuk ke ranah domestik/keluarga hingga individu. Situasi ini berbeda dengan pada masa Ki Hadjar Dewantara dahulu. Saat ini masyarakat dan keluarga tidak lagi menjadi institusi yang kuat, padahal melalui keluarga dan masyarakat inilah landasan moral dan karakter diletakkan. Hal ini seiring juga dengan melemahnya peranan ibu dalam mendidik meski secara insting, seorang ibu memiliki naluri mendidik anaknya. Tidak jarang peran ibu yang mendidik dan meletakkan fondasi moral dan karakter digantikan oleh pembantu rumah tangga dalam keluarga modern. Untuk keluar dari jerat industrialisasi pendidikan, maka diperlukan sinergi antara negara dan masyarakat sipil. Sinergi strategis ini menekankan bahwa persoalan pendidikan bukan hanya ada pada ranah negara yang juga pada saat ini terbatas kemampuannya. Akan tetapi ranah pendidikan juga merupakan wilayah dari masyarakat sipil yang menghadapi problema kehidupan sehari-hari. Kolaborasi keduanya akan menjadi counter terhadap penguasaan pendidikan oleh kepentingan bisnis.

Hal yang tidak kalah penting dari sinergi negara-masyarakat dalam membangun pendidikan adalah pembangunan strategi

pendidikan dan strategi kebudayaan. Tidak ada bentuk perkembangan pendidikan yang keluar dari akar budaya peradabannya, oleh karena itu budaya merupakan bagian yang melekat dengan pendidikan itu sendiri. Pada dasarnya kebudayaan seharusnya tumbuh secara natural. Namun sejarah Indonesia mencatat bahwa pembangunan peradaban di Indonesia tidak pernah tuntas. Pembangunan kebudayaan dapat dilakukan dengan memperkuat ketahanan masyarakat dan membuka ruang bagi ekspresi-ekspresi budaya dalam interaksi sosial masyarakat. Untuk membangun ini, maka logika industri pendidikan harus dihilangkan karena hal ini mengasingkan manusia dari kebudayaan itu sendiri.

Kebudayaan menjadi pionir dari pembentukan peradaban yang kemudian menjadi dasar dari moralitas. Oleh karena itu perlu untuk dibangun ruang-ruang sosial untuk pengembangan budaya. Dengan kata lain, pembangunan sudah seharusnya tidak terpaku pada pembangunan ekonomi tapi juga mengembangkan pembangunan menggunakan pendekatan budaya. Barangkali pendekatan budaya ini dapat memberikan ruang bagi pembangunan peradaban Indonesia melalui terbukanya ruang interaksi sosial. Mengingat tantangan globalisasi akan budaya sangat nyata, yakni mensubsitusi budaya lokal dengan budaya global sehingga masyarakat menjadi masyarakat global/beridentitas global.

Berkaitan dengan hal di atas, membangun karakter sangat diperlukan dalam memaknai kehidupan merdeka yang telah dicapai oleh bangsa kita atas karunia Tuhan. Pembentukan karakter adalah proses membangun dari bahan mentah menjadi cetakan yang sesuai dengan bakat masing-masing. Pendidikan adalah proses pembangunan karakter. Pembangunan karakter merupakan proses membentuk karakter, dari yang kurang baik menjadi lebih baik, tergantung pada bekal masing-masing. Mau dibawa kemana karakter tersebut dan mau dibentuk seperti apa nantinya, tergantung pada potensinya dan juga tergantung pada peluangnya. Pembangunan dan pendidikan karakter sebenarnya telah dibatasi (kontradiktif) dengan pendidikan mahal dan komersil atau kapitalisme pendidikan. Bangsa adalah kumpulan manusia individual, karakter bangsa dicerminkan oleh karakter manusia-manusia yang ada di dalam bangsa tersebut. Sebuah bangsa lahir mirip dengan seorang manusia lahir. Seorang bayi lahir dari perjuangan keras seorang ibu. Pembangunan karakter bangsa juga demikian, dimana pembangunan karakter bangsa berkaitan dengan sejarah dimasa lalu yang memberikan syarat-syarat material yang memunculkan persepsi masyarakat terhadap kondisinya tersebut, dipengaruhi oleh kejadian konkret di masa kini.

Pembangunan karakter diperlukan untuk menumbuhkan watak bangsa yang bisa dikenali secara jelas, yang membedakan diri dengan bangsa lainnya, dan ini diperlukan untuk menghadapi situasi zaman yang terus berkembang. Pembangunan karakter menjadi penting karena situasi kehidupan tertentu dan konteks keadaan tertentu membutuhkan karakter yang sesuai untuk menjawab keadaan yang ada tersebut. Misalnya, bangsa yang masih rendah teknologinya memerlukan karakter yang produktif dan kreatif dari generasi bangsanya, tempat berpikir ilmiah menjadi titik tekan

karena hal itulah yang sangat dibutuhkan untuk menjawab tuntutan sehingga tidak ketergantungan yang menciptakan manusia yang market minded. Pembangunan karakter yang keras harus dilakukan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Jangan sampai titik tekan pembangunan karakter tersebut justru menjadi tidak cocok dengan kebutuhan untuk mengatasi masalah yang ada. Pembangunan karakter itulah yang kemudian dapat dilakukan oleh pendidikan karena didalamnya proses sosial mengarahkan generasi yang dilakukan.

III. PENUTUP

Pendidikan adalah pemberdayaan bagi manusia didik dalam menghadapi dinamika kehidupan baik masa kini maupun masa yang akan datang, maka pemahaman tentang kemanusiaan secara utuh merupakan keniscayaan. Sebaliknya, jika pengertain dan pemahaman terhadap pendidikan kurang tepat tentu akan melahirkan konsep dan praktik pendidikan yang juga kurang proporsional. Memahami manusia bukan pekerjaan yang mudah. Perbincangan tentang manusia itu sendiri juga dinamis, berkembang dari waktu ke waktu sesuai perkembangan peradaban yang tak pernah usai. Karena pemahaman manusia yang terus berkembang maka pendidikan itu sendiri harus dinamis.

Berkaitan dengan hal di atas, pendidikan agama berperan langsung dalam usaha pencapaian tujuan pendidikan nasional, karena sesuai dengan bunyi Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional tentang sistem pendidikan nasional, Bab II pasal 4 yaitu: "Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan". Karena keimanan dan ketaqwaan hanya dapat dicapai secara sempurna melalui pendidikan agama. Oleh sebab itu, pendidikan agama mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam mencapai tujuan dan keberhasilan pendidikan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mustofa. *Sejarah Pendidikan di Indonesia*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2005
- Ali, Ibrahim. Akbar. 2010. *Pendidikan Karakter* (akhmadsudrajat.wordpress.com), diakses 20 Agustus 2015
- David, Atchoarena dan Francoise Cailods. *Pendidikan Untuk Abad XXI*. UNESCO: Unesco Publishing, 1998.
- H.A.R. Tilaar. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Jalaluddin, Rakhmat. 2002. *Psikologi Agama*. Jakarta : PT Grafindo Persada.
- May. *Pekerja Anak dan Perencanaan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Prayitno. *Hak dan Kewajiban Pendidikan Anak*. Padang: Jurusan BK FI P UNP, 2000.
- Permendiknas No. 23 Tahun 2006 tentang *Standar Kompetensi Lulusan*.
- Renstra Kemendiknas 2010-2014. UU NO. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.